

Makan Bergizi Gratis: Analisis Kebijakan Menurut Politik Islam

Ilham Budiman Panggabean^{1*}, Hasyimsyah Nasution² Elly Warnisyah Harahap³

^{1,2,3}Program Studi Magister Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Corresponding Author's e-mail ilham3001243005@uinsu.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1375 - 1390

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3494>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3494>

Article History:

Received: 17-07-2026

Revised: 29-07-2026

Accepted: 01-08-2026

Abstract : The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a national strategic policy enacted through Presidential Regulation No. 115 of 2025 to elevate human resource quality. However, street-level bureaucratic execution faces socio-geographical and structural financial constraints. This qualitative study employs a phenomenological approach by examining 7 structural sample units in North Sumatra with an asymmetrical composition *Contra* (Problematic) and *Pro* (Excellent). Primary data were gathered through in-depth interviews with 7 technocratic key informants and analyzed using data reduction, data display, conclusion drawing, and method triangulation. The *Pro* cluster successfully operated central kitchens producing 3,000 portions/day and established rural circular economies. Conversely, the *Contra* cluster recorded systemic implementation failures automated freezing of Virtual Account funds by the *Dialur* application due to rural internet bottlenecks, spatial injustice regarding the standardized national portion index in the 3T region of South Nias, and targeting errors in coastal areas that shifted workloads onto teachers. In the Islamic Political perspective, this problematic reality demonstrates a distortion of *amanah* and distributive justice (*al-'adalah al-ijtima'iyah*) caused by the central bureaucracy's spatial blindness, which compromises children's life protection (*hifzhun nafs*) and intellectual safeguard (*hifzhul 'aql*). The study establishes the *Maslahah 'Ammah*-Based Public Policy Integration Model, asserting that technocratic good governance must be aligned with Islamic moral driving forces by applying asymmetric fiscal formulas and long-term outcome monitoring.

Keywords : Free Nutritious Meal, Public Policy, Islamic Politics, *Amanah*, Justice, *Maslahah 'Ammah*.

Abstrak : Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik strategis nasional yang diamanatkan melalui Perpres No. 115 Tahun 2025 untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, eksekusi birokrasi barisan depan (street-level bureaucracy) di lapangan masih menghadapi hambatan struktural sosiogeografis dan finansial. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus fenomenologis ini menarik 7 unit sampel struktural secara asimetris dengan proporsi Kontra (Bermasalah) dan Pro (Berjalan Baik) di Provinsi Sumatera Utara. Data primer dihimpun via wawancara mendalam terhadap 7 informan kunci teknokratis dan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan kluster Pro sukses mengelola central kitchen 3.000 porsi/hari dan kluster ekonomi sirkular desa. Sebaliknya, kluster Kontra merekam kegagalan implementasi sistemik berupa pembekuan otomatis dana Virtual Account oleh aplikasi Dialur akibat kendala internet desa, ketidakadilan spasial indeks porsi nasional pada wilayah 3T Nias Selatan, serta bias penargetan (inclusion and exclusion error) di wilayah pesisir yang memicu pemindahan beban kerja (workload shifting) ke pundak guru. Dalam perspektif Politik Islam, potret kontra ini menjadi bukti distorsi nilai amanah dan keadilan distributif (*al-'adalah al-ijtima'iyah*) akibat "kebutaan spasial" birokrasi pusat yang mengorbankan perlindungan jiwa (*hifzhun nafs*) dan akal (*hifzhul 'aql*) anak. Kesimpulan penelitian ini melahirkan Model Integrasi Kebijakan Publik Berbasis *Maslahah 'Ammah* yang menegaskan bahwa efektivitas good governance teknokratis wajib diintegrasikan

dengan roh penggerak etis (moral driving force) Islam melalui penerapan formula fiskal asimetris dan penguatan sistem outcome monitoring jangka panjang.

Kata Kunci Makan Bergizi Gratis, Kebijakan Publik, Politik Islam, Amanah, Keadilan, Masalah 'Ammah.

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah bertransformasi menjadi instrumen kebijakan publik strategis nasional yang diwujudkan melalui pembentukan komitmen regulasi dan kelembagaan negara yang kuat. Berdasarkan ketetapan pasca pemilihan umum 2024, orientasi analisis terhadap program ini harus diletakkan dalam koridor teknokratis kebijakan yang objektif, ilmiah, dan berbasis data riil di lapangan (*evidence-based policy*), bukan lagi didasarkan atas landasan atau sentimen partai politik tertentu.¹ Dimensi Etika Politik Islam hadir sebagai pemandu moral transendental, pisau evaluatif, dan prinsip aksiologis yang memastikan jalannya kebijakan publik tersebut tetap berada dalam rel amanah, keadilan sosial, dan kemaslahatan umat. Untuk memahami dinamika riil dan efektivitas implementasi operasional program MBG di tingkat akar rumput (*grassroots*), penelitian ini berpijak langsung pada data riset sosiologis dan pengamatan empiris di lapangan pada lokus strategis di Provinsi Sumatera Utara.²

Secara normatif, prioritas kebijakan negara dalam menjamin kecukupan pangan dan ketahanan gizi bagi generasi penerus bangsa memiliki landasan teologis yang sangat kuat di dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Quraisy (106) ayat 3-4

{فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ 4

Dalam Tafsir Al-Mishbah, ayat ini dianalisis sebagai isyarat konseptual konstitusional bahwa kecukupan pangan (*if'am min ju*) dan jaminan rasa aman (*amnu min khauf*) adalah dua pilar paling mendasar yang wajib dipenuhi oleh pemegang otoritas sebelum menuntut kepatuhan ritual atau produktivitas sosial dari masyarakat. Oleh karena itu, program MBG dalam lensa tafsir ini dipandang sebagai bentuk pengejawantahan dari fungsi perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*) di tingkat hulu kehidupan bernegara.³

Guna merasionalkan analisis kebijakan publik empiris berbasis pembuktian lapangan, penelitian kualitatif-fenomenologis ini mengerucutkan fokus kajiannya dengan menarik total 7 unit sampel struktural di Sumatera Utara, yang diklasifikasikan ke dalam 3 unit dapur pelayanan berkinerja baik, 3 unit dapur pelayanan bermasalah yang terintegrasi karakteristik wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), serta 1 pimpinan koordinasi regional selaku penanggung jawab kebijakan wilayah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berorientasi pada penggalian makna terdalam di balik realitas tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pendekatan deskriptif-analitis diterapkan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi riil manajemen operasional logistik di wilayah Sumatera Utara. Sebagai pisau analisis utama di tingkat akar rumput, pendekatan Fenomenologi digunakan untuk

¹ M. Hadinata, "Free Nutritious Meal Policy in Indonesia under President Prabowo: A Policy, Fiscal, and Political Analysis Grounded in International Evidence," *Jurnal Bina Praja*, Vol. 18, No. 1 (2026), hlm. 2896, <https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.2896>.

² Badan Gizi Nasional, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis* (Jakarta: Badan Gizi Nasional, 2025), hlm. 14.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 462.

mengeksplorasi secara mendalam pengalaman hidup (*lived experience*) dari para aktor sosial yang terlibat langsung.⁴

Penelitian ini diperkuat oleh pendekatan normatif-filosofis etika pemerintahan Islam sebagai parameter evaluatif. Aktor pelaksana di lapangan ditarik menggunakan teknik purposif (*purposive sampling*) dengan proporsi asimetris (Kontra/Bermasalah dan Pro/Berjalan Baik) sesuai instruksi peta jalan pengujian secara kritis. Data primer dihimpun dari 7 informan kunci teknokratis melalui wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh dari naskah regulasi resmi Perpres No. 83 Tahun 2024, Perpres No. 115 Tahun 2025, Juknis BGN No. 401.1 Tahun 2025, serta kitab-kitab tafsir. Proses analisis data mengadopsi model bertingkat *Critical Discourse Analysis* (CDA) yang membagi analisis ke dalam dimensi mikro (teks juknis), mezo (praktik logistik lapangan SPPG), dan makro (konteks sosiopolitik ketahanan pangan). Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode secara berlapis.⁵

Pemilihan khalayak sasaran atau informan kunci (key informants) dalam penelitian ini dilakukan secara non-probability sampling dengan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*). Untuk mengukur akuntabilitas kebijakan secara kritis dan objektif (*evidence-based policy*) serta memitigasi bias elektoral, penentuan unit sampel struktural di lapangan didesain secara asimetris dengan proporsi Kontra (Kluster Bermasalah) dan Pro (Kluster Berjalan Baik). Dari total target makro pemetaan Badan Gizi Nasional (BGN) sebanyak 1.762 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara, ditarik 7 unit sampel struktural yang bertindak sebagai informan kunci teknokratis, yaitu:

- Informan 1 Kepala SPPG Menarhanud 2 (Lokus Urban Perkotaan Kota Medan - Kluster Pro).
- Informan 2 Pengawas Gizi dan Mutu SPPG BPMP Sumut 1 (Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan - Kluster Pro).
- Informan 3 Pengawas Gizi dan Mutu SPPG Sibuhuan 1 (Pondok Pesantren Syekh Muhammad Dahlan, Kabupaten Padang Lawas - Kluster Pro).
- Informan 4 Kepala SPPG Sei Rampah 1 (Lokus Rural Kabupaten Serdang Bedagai - Kluster Kontra/Bermasalah 1).
- Informan 5 Pengawas Operasional SPPG Teluk Dalam 1 (Lokus Terpencil Wilayah 3T Kabupaten Nias Selatan - Kluster Kontra/Bermasalah 2).
- Informan 6 Pengawas Keuangan dan Administrasi SPPG Pantai Labu 2 (Desa Kubah Sentang, Kabupaten Deli Serdang - Kluster Kontra/Bermasalah 3).
- Informan 7 Koordinator Regional Kantor Regional Badan Gizi Nasional (Kareg BGN) Provinsi Sumatera Utara selaku Pengawas Makro Regional.

Bahan dan alat pengumpulan data primer dalam penelitian lapangan ini meliputi draf panduan wawancara fenomenologis yang fleksibel terarah, alat perekam audio digital (*voice recorder*) yang telah disetujui oleh informan, serta buku catatan lapangan melekat (*field notes*) untuk menangkap simbol sosiologis non-transaksional selama observasi. Sementara itu, bahan data sekunder berupa dokumen resmi tekstual-normatif yang valid meliputi naskah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola MBG TA 2026, berkas manifes logistik pengiriman

⁴ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evidence-Based Policy* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2024), hlm. 210.

⁵ D. D. Aulia, A. Astri, T. L. Afiani, & Kurniati, "The Existence of Universal Values of Islamic Political Ethics in the Formation of Public Policy," *Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies*, Vol. 2, No. 2 (2025), hlm. 155.

digital pada portal SIPGN, laporan e-reporting finansial pada aplikasi Dialur, serta draf fatwa sosioreligius Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara.

Desain instrumen analisis atau "alat" evaluasi dalam riset kualitatif terintegrasi ini diposisikan pada keselarasan fungsional (fit model) antara kerangka teknokratis manajemen sektor publik modern (New Public Management) dengan parameter normatif Etika Politik Islam kontemporer (Siyasah Syar'iyah). Kinerja dan produktivitas alat analisis ini bekerja secara dialektis dengan menjadikan nilai-nilai profetik universal—prinsip amanah jabatan (anti-korupsi anggaran), prinsip 'adl (keadilan distributif afirmasi spasial), dan tujuan kemaslahatan umum (masalah 'ammah berbasis grand theory Maqashid al-Syari'ah hifz al-nafs dan hifz al-'aql)—sebagai batu uji moral transendental untuk menguliti tingkat efektivitas, kebocoran anggaran, implikasi moral hazard, kegagalan implementasi (implementation failure), eror penargetan kuota (inclusion and exclusion error), serta fenomena pemindahan beban kerja (workload shifting) pada ketujuh objek sampel struktural BGN Sumatera Utara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi tiga metode kualitatif (triangulasi metode) secara simultan hingga mencapai titik jenuh data (data saturation), yaitu (1) Wawancara mendalam (in-depth interview) secara tatap muka bersama 7 informan kunci untuk menggali pengalaman hidup dan hambatan struktural sosiogeografis; (2) Observasi langsung nontransaksional (direct observation) di lingkungan area steril dapur umum central kitchen SPPG dan ruang kelas satuan pendidikan penerima manfaat guna memeriksa standardisasi hygiene sanitasi CPPOB serta lini waktu distribusi logistik; dan (3) Studi dokumentasi (documentation study) terhadap salinan berkas regulasi formal, manifes pengiriman berkode batang (barcode), dan data e-faktur at cost belanja harian.

Teknik analisis data mengadopsi model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang berjalan secara sirkular berkesinambungan melewati empat tahapan taktis:

1. Penyusunan dan Reduksi Data (Data Reduction) Mentranskripsikan rekaman lisan wawancara menjadi dokumen teks utuh, lalu melakukan proses pengodean (coding) ketat guna memisahkan data teknis-manajerial operasional dengan draf klaster nilai moral keagamaan.
2. Penyajian Data (Data Display) Mengorganisasikan data yang telah tereduksi ke dalam bentuk matriks terstruktur, jaringan kerja konseptual sosiogeografis, dan bagan alur Critical Discourse Analysis (CDA) bertingkat (mikro, mezo, makro) untuk memudahkan pemetaan komparatif antar-lokus.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) Merumuskan jawaban konseptual logis atas rumusan masalah, mempertemukan realitas empiris lapangan dengan landasan teoretis Grand Theory Maqashid al-Syari'ah, serta membangun kristalisasi pemikiran berupa Draf Model Integrasi Kebijakan Publik Berbasis Masalah 'Ammah.
4. Triangulasi Data secara Berlapis Melakukan cross-check validitas objektif dengan membandingkan draf pernyataan lisan antara pihak Korwil/Kareg BGN dengan realitas fisik logistik riil pada unit dapur SPPG perkotaan, pedesaan, maupun wilayah 3T guna memastikan hasil riset kredibel, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Tata Kelola Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tingkat Lapangan

Penyenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara operasional di tingkat akar rumput Provinsi Sumatera Utara bertumpu pada keandalan unit nonstruktural pelaksana

operasional dapur gizi, yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berdasarkan data pemetaan riil Kantor Regional Badan Gizi Nasional (Kareg BGN) Provinsi Sumatera Utara, program nasional ini ditargetkan mendirikan total 1.762 unit SPPG di 33 kabupaten/kota dengan kapasitas melayani puluhan ribu peserta didik, anak balita, serta kelompok ibu. Hingga triwulan berjalan pada Tahun

Anggaran 2026, realisasi sebaran infrastruktur logistik menunjukkan disparitas performa tata kelola dan kesiapan yang dinamis antarwilayah geografis. Sebagai contoh, kluster rural-suburban Kabupaten Deli Serdang mencatat pertumbuhan masif dengan beroperasinya 42 unit SPPG dari target total 190 unit SPPG. Guna merasionalkan analisis kebijakan publik empiris berbasis pembuktian lapangan (*evidence-based policy*) serta memitigasi bias sentimen elektoral, porsi penekanan instrumen hasil riset kualitatif-fenomenologis ini dibagi secara asimetris dengan proporsi Kontra (Sampel Bermasalah) dan Pro (Berjalan Baik) pada 7 unit sampel struktural di Sumatera Utara.⁶

1. Analisis Kluster Dapur Pelayanan Berkinerja Baik (Pro)

Kluster ini menyajikan hasil pengamatan terhadap tiga unit pelayanan mandiri yang dinilai sukses menjalankan lima pilar manajemen sektor publik modern secara efektif, adaptif, dan berorientasi pada mutu pelayanan (*service quality focus*).

a. SPPG Menarhanud 2 (Lokus Urban Perkotaan Kota Medan) Keunggulan Rantai Pasok Perkotaan

SPPG Menarhanud 2 yang terletak di Kecamatan Medan Tuntungan merepresentasikan keberhasilan model aglomerasi perkotaan padat penduduk. Unit ini sukses mengoperasikan ekosistem dapur pusat (*central kitchen*) dengan kapasitas produksi andal guna melayani ribuan porsi makanan gizi seimbang harian tanpa memicu penumpukan logistik (*bottleneck*). Efektivitas tata kelola dicapai melalui digitalisasi sistem *feedback loop* harian yang menghubungkan operator internal dapur dengan manifes data kehadiran *real-time* sekolah dasar sasaran melalui aplikasi digital sebelum kurir logistik dimobilisasi. Standardisasi menu lengkap hewani-nabati diawasi ketat oleh tenaga ahli gizi guna memastikan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan kepatuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Pendistribusian ompreng *stainless steel food grade* tipe 304 menggunakan armada kendaraan roda empat boks isolasi termal tertutup guna menjaga drat zona aman masakan di atas suhu 60°C menembus kemacetan urban lalu lintas Kota Medan, dengan target pengantaran tepat waktu di bawah 30 menit perjalanan sebelum jam istirahat pertama anak sekolah.

b. SPPG BPMP Sumut 1 (Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan) Keunggulan Ekonomi Sirkulasi

SPPG BPMP Sumut 1 merepresentasikan keberhasilan implementasi model ekonomi sirkular desa (*Circular Economy Village*) di wilayah perkotaan melalui jaringan kemitraan pendek bersama gabungan kelompok tani (gapoktan) dan koperasi peternak rakyat kecil Sumatera Utara. Penyerapan komoditas pertanian lokal (telur ayam, sayuran segar, beras) secara rutin berhasil memotong peran makelar pangan terpusat, sehingga perputaran dana fiskal Bantuan Pemerintah (Banper) menetap memakmurkan roda ekonomi mikro tingkat tapak. Keandalan administratif unit ini teledan dari kedisiplinan pengawas keuangan yang tertib melakukan kliring e-faktur belanja

⁶ S. Makambombu, "Local Food, Centralized Governance, and the Limits of Policy Localization in Indonesia's Free Nutritious School Meal Program: Evidence from Sumba," *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, Vol. 7, No. 1 (2026), hlm. 946, <https://doi.org/10.46456/jiSMAep.v7i1.946>.

secara *at cost* (pencatatan biaya riil) pada portal akuntansi, menjamin kelancaran pasokan dana *auto top-up* saldo harian melalui Virtual Account Bank Himbara tanpa *idle cash* (pengendapan dana publik) maupun disrupsi teknis, sehingga menghasilkan efisiensi *zero logistics waste* (tidak ada makanan sisa terbuang sia-sia).⁷

c. SPPG Sibuhuan 1 (Kabupaten Padang Lawas) Keunggulan Pelayanan Inklusif Institusi Keagamaan

SPPG Sibuhuan 1 yang berlokasi di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Dahlan Kabupaten Padang Lawas sukses mengelola dapur umum khusus pesantren secara responsif dengan menyesuaikan jadwal penyaluran yang sinkron bersama kalender biologi aktivitas santri dan ibadah puasa. Pengelola mendayagunakan partisipasi relawan lokal desa dari golongan kurang mampu (*mustadh'afin*) sebagai tenaga penjamah makanan, serta menegakkan disiplin penimbangan gramasi kalori masakan yang ketat. Unit ini membuktikan bahwa jaminan sosial pangan negara mampu berjalan inklusif, meruntuhkan diskriminasi sekat fasilitas administrasi antara sekolah umum negeri dengan institusi keagamaan swasta pedesaan Sumatera Utara.

2. Analisis Kluster Dapur Pelayanan Bermasalah (Kontra)

Sesuai rancangan riset kritis asimetris, bagian ini menguliti kegagalan implementasi (*implementation failure*) sistemik pelaksana barisan depan (*street-level bureaucracy*) akibat kendala sosiomanajerial, patologi birokrasi, dan asimetri anggaran.

a. SPPG Sei Rampah 1 (Kabupaten Serdang Bedagai) Hambatan Finansial Fiskal dan Disrupsi Digital

SPPG Sei Rampah 1 di wilayah pedesaan (*hinterland*) Kabupaten Serdang Bedagai mencatat kemacetan total produksi akibat problem likuiditas finansial struktural yang dipicu oleh rigiditas aplikasi pelaporan terpusat bernama Dialur. Portal Dialur menerapkan instrumen sanksi otomatis (*automatic penalty*) berupa pembekuan saldo Virtual Account SPPG jika pengawas lapangan terlambat mengunggah manifes belanja harian dan nota *at cost* melewati batas waktu digital malam hari. Di area rural pedesaan Sergai, kendala input ini dipicu oleh buruknya konektivitas jaringan internet (*blank spot*) dan lambatnya klaim nota manual pedagang pasar tradisional. Akibatnya, dapur umum tidak memiliki modal kerja harian untuk membeli bahan baku segar hari berikutnya, melumpuhkan total kapasitas produksi dapur dan mengorbankan hak dasar pemenuhan gizi ribuan anak sekolah dasar penerima manfaat yang terpaksa menanti tanpa kepastian makanan.

b. SPPG Teluk Dalam 1 (Kabupaten Nias Selatan) Hambatan Infrastruktur, Spasial, dan Asimetri Anggaran di Wilayah 3T

SPPG Teluk Dalam 1 di Kabupaten Nias Selatan merepresentasikan potret kritis wilayah Kepulauan Terpencil 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Hambatan fisik berupa keterbatasan sarana sanitasi air bersih, ketiadaan ruang pendingin (*cold storage*) skala besar akibat pemadaman listrik darurat berkala dari pasokan daya lokal memicu tingginya risiko kerusakan biologis zat gizi pangan. Batas radius pengiriman maksimal 6 kilometer atau waktu tempuh pengiriman maksimal 30 menit menjadi mustahil dipenuhi armada kurir biasa karena topografi perbukitan terjal dan jalan rusak parah, menyebabkan makanan tiba di sekolah dalam kondisi dingin serta rentan kontaminasi biologis silang (*cross-contamination*). Masalah diperparah oleh kesalahan formulasi

⁷ A. Wibowo & Y. Yuliani, "Three Decades of School Meal Program Research: Bibliometric Insights for Governance and Sustainability of Indonesia's Free Nutritional Meal Initiative (MBG)," *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, Vol. 10, No. 1 (2026), hlm. 745, <https://doi.org/10.36574/jpp.v10i1.745>.

perancangan indeks anggaran biaya per porsi dari pusat yang disetarakan seragam nasional secara flat, dinilai "buta wilayah" karena mengabaikan tingginya koefisien kesulitan geografis (*geographical difficulty coefficient*) yang memicu lonjakan harga komoditas akibat mahalnnya ongkos angkut transportasi laut.

c. SPPG Pantai Labu 2 (Kabupaten Deli Serdang) Karut-Marut Administrasi Penargetan dan Fenomena Workload Shifting

SPPG Pantai Labu 2 di Desa Kubah Sentang menghadapi hambatan koordinasi horizontal akibat lemahnya sinkronisasi data kuota antara catatan Dapodik/EMIS pusat dengan jumlah fisik siswa riil di ruang kelas sekolah suburban pesisir. Ketidaksinkronan data memicu disrupsi penargetan (*targeting error*) ganda secara simultan *inclusion error* (subsidi boks makanan gratis dinikmati anak guru golongan mampu) dan *exclusion error* (tercoretnya anak nelayan miskin *mustadh'afin* dari daftar penerima manfaat akibat jeda pemutakhiran data mutasi). Karut-marut manifes harian ini memicu fenomena *workload shifting* (pemindahan beban kerja administrasi logistik) ke pundak para guru sekolah dasar setempat, yang terpaksa membuang waktu mengurus sortir pembagian ompreng, penataan meja steril, hingga pencatatan indeks sisa makanan (*food waste index*) sehingga menurunkan fokus edukasi utama di ruang kelas.

3. Peran Kantor Regional BGN Provinsi Sumatera Utara (Simpul Supervisi Makro)

Kepala Regional Sumatera Utara Badan Gizi Nasional (Kareg BGN Sumut) memanfaatkan dasbor terintegrasi SIPGN (Sistem Informasi Pelayanan Gizi Nasional) untuk mengaudit serapan anggaran operasional. Namun kontribusi paling krusial terletak pada kepemilikan otoritas diskresi administratif khusus untuk mitigasi risiko operasional darurat wilayah. Ketika bencana alam banjir makro sosiogeografis memutus akses jalan menuju sekolah sasaran di perkotaan Medan maupun Deli Serdang, Kareg secara taktis mengeluarkan instruksi darurat pemindahan distribusi paket makanan siap santap secara akuntabel (*at cost*) untuk dialihkan menjadi ransum bantuan pangan bagi warga masyarakat korban terdampak bencana banjir di sekitar wilayah tersebut guna menyelamatkan jiwa warganya.

B. Implikasi Program MBG terhadap Etika Politik Islam

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian kontekstual bersama tokoh alim ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, program intervensi nutrisi nasional ini memiliki derajat legitimasi moral keislaman yang sangat tinggi. Penyediaan makanan bergizi cuma-cuma bagi kaum papa bukan sekadar jaring pengaman sosial sekuler, melainkan perwujudan konkret dari kewajiban kolektif penguasa (*fardhu kifayah* yang dibebankan kepada institusi negara). Pandangan ulama menegaskan bahwa pembiayaan APBN yang fantastis wajib didukung secara syar'i selama operasionalnya berjalan secara jujur (*shiddiq*) dan bersih dari makelar pangan koruptif.

1. Nilai Amanah dalam Pelaksanaan MBG

Dalam falsafah hukum tata negara Islam (*siyasah syar'iyah*), kekuasaan politik dan otoritas anggaran diposisikan sebagai titipan transendental Allah SWT yang wajib dikelola demi kemaslahatan publik (*ri'ayah al-syu'un*). Penegasan prinsip amanah kepemimpinan ini mengacu pada perintah mutlak Allah SWT di dalam QS. An-Nisa (4) ayat 58

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...*”⁸

Di dalam *Tafsir Al-Mishbah*, penggunaan bentuk jamak *al-amanat* mengisyaratkan bahwa cakupan amanah pelayanan publik bersifat luas dan berlapis. Amanah terbesar birokrat adalah mengembalikan hak dasar kemaslahatan hidup langsung kepada pemilik sahnya, yaitu masyarakat desil kemiskinan ekstrem dan anak-anak stunting. *Tafsir Ibnu Katsir* menguatkan bahwa para penguasa adalah pengurus rakyat yang memikul tanggung jawab di hadapan hukum Tuhan untuk memastikan tidak ada sen pun dana jaminan sosial yang dikorupsi atau disalahgunakan.

Implikasi empiris pada SPPG Menarhanud 2 Kota Medan menunjukkan aktualisasi nilai amanah melalui disiplin *time-based operations* kurir logistik dan pengawasan higiene sanitasi digital (*kitabah*) sebagai wujud perlindungan hak hidup (*hifz al-nafs*). Namun sebaliknya, ketidakfleksibelan algoritma aplikasi Dialur di SPPG Sei Rampah 1 yang membekukan dana operasional secara otomatis hanya karena kendala sinyal internet internet pedesaan dinilai mencederai nilai amanah substantif. Tindakan "kebutaan administratif" terpusat ini mengorbankan hak makan riil anak sekolah demi kepatuhan dokumen formalistik kaku, memicu fenomena patologi birokrasi manipulasi kepatuhan (*compliance manipulation*) di mana birokrat lapangan terpaksa mengunggah nota estimasi yang tidak sinkron demi meloloskan penilaian algoritma sistem digital pusat, sebuah tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran syariat.

2. Nilai Keadilan (Adl)

Prinsip keadilan distributif (*al-'adalah al-tawzi'iyyah*) mengharuskan alokasi anggaran belanja negara disebarkan secara proporsional berlandaskan perintah QS. An-Nahl (16) ayat 90

وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...*”

Tafsir Al-Mishbah membedah keadilan (*al-'adl*) sebagai tindakan menempatkan sesuatu secara proporsional sesuai tempatnya tanpa diskriminasi. Implementasi keadilan pada Program MBG menuntut penolakan terhadap favoritisme, *clientelisme* politik, maupun diskriminasi sekat administrasi antara sekolah umum negeri dengan madrasah/pesantren swasta pedesaan, sebagaimana terwujud pada kesetaraan akses di SPPG Sibuhuan 1 Padang Lawas.

Akan tetapi, penyeragaman indeks biaya Banper per porsi secara flat seragam nasional oleh pemerintah pusat mencerminkan ketidakadilan spasial yang nyata bagi SPPG Teluk Dalam 1 Nias Selatan. Keadilan sosial Islam menghendaki perlakuan fiskal asimetris-afirmatif yang memberikan anggaran logistik lebih besar kepada wilayah periferi marjinal 3T guna menutup biaya angkut kesulitan geografis. Menyamaratakan anggaran anak kepulauan terpencil dengan anak perkotaan yang mapan logistik mencederai hak kaum lemah (*mustadh'afin*), karena memaksa unit pelayanan rural memotong alokasi belanja nutrisi bersih demi menutup pembengkakan ongkos armada transportasi. Keadilan distributif juga dicerai di SPPG Pantai Labu 2 melalui *inclusion error* data sasaran dan praktik *workload shifting* guru tanpa kompensasi finansial yang makruf.⁹

3. Nilai Maslahah 'Ammah

Tujuan pamungkas (*ultimate goal*) tata negara Islam adalah melahirkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) dengan berpegang pada kaidah hukum Islam normatif dari sabda Rasulullah SAW (HR. Ibnu Majah dan Daraqutni)

⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Vol. 2 (Riyadh: Dar Thayyibah, 2022), hlm. 315.

⁹ J. S. Pulungan, *Prinsip-Prinsip Siyasa Syar'iyah Mencegah Lapar dan Takut* (Jakarta: Amzah, 2024), hlm. 88.

{ضَرَّارٌ وَلَا ضَرَّارٌ لَا}

“Tidak boleh ada bahaya (menimbulkan perkara yang memudaratkan tanpa sengaja) dan tidak boleh membalas bahaya.”¹⁰

Imam al-Nawawi dalam syarahnya menegaskan kaidah ini melarang keras adanya pembiaran struktural terhadap segala hal yang menurunkan kualitas kesehatan publik. Krisis stunting dan kelaparan struktural laten dinilai sebagai bentuk *darar* (bahaya biologis makro) yang merusak perkembangan fisik (*hifz al-nafs*) dan selsel kognitif otak anak (*hifz al-'aql*) generasi masa depan.

Program MBG di Sumatera Utara secara empiris berhasil mewujudkan kemaslahatan multifaset melalui model ekonomi sirkular desa di SPPG BPMP Sumut 1 Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, di mana penyerapan pasokan pangan lokal secara konsisten melahirkan dampak pengganda ekonomi (*economic multiplier effect*) yang membebaskan petani kecil dari eksploitasi tengkulak pangan yang zalim. Kedaulatan pangan berbasis nilai (*value-based governance*) terwujud nyata ketika pengawinan manajemen teknokratis modern bersanding bersama komitmen moral ketuhanan para aktor pelaksana lapangan.¹¹

C. Draf Rekomendasi Model Integrasi Kebijakan Publik

Guna menjembatani jarak implementasi (*implementation gap*) antara rigiditas administrasi teknokratis dengan keluhuran moral Islam pada tujuh objek pengamatan di Sumatera Utara, dirumuskan draf struktur Model Integrasi Kebijakan Publik Berbasis Masalah 'Ammah melalui matriks operasional berikut

Tabel 4.1 Matriks Model Integrasi Kebijakan Publik Teknokratis dan Etika Islam

Aspek Kebijakan	Instrumen Teknokratis Modern	Prinsip Etika Politik Islam	Deskripsi Implementasi Model Integrasi Lapangan
Perencanaan Data	Sistem Informasi Manajemen Digital Terpadu	<i>Amanah & Shiddiq</i> (Kejujuran Objek)	Sinkronisasi data kuota manifes <i>real-time</i> lintas kementerian (Dapodik, EMIS, P3KE) guna mengeliminasi celah bias <i>inclusion and exclusion error</i> .
Tata Keuangan	Mekanisme <i>Auto Top-Up</i> Virtual Account Bank Himbara	<i>Amanah</i> (Anti-Korupsi Fiskal)	Penerapan sistem pencatatan belanja pengeluaran riil secara <i>at cost</i> guna memotong celah <i>moral hazard</i> makelar pangan dan penumpukan <i>idle cash</i> .
Operasional Dapur	Standardisasi Dapur Pusat (<i>Central Kitchen</i>) Industri	<i>Maslahah 'Ammah</i> (<i>Hifz al-Nafs & 'Aql</i>)	Kepatuhan mutlak terhadap regulasi higiene sanitasi CPPOB, gramasi nutrisi AKG, penguncian suhu termal masakan, serta penyimpanan <i>retained samples</i> .

¹⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Ahkam, No. Hadis 7138 (Beirut: Dar Thauk al-Najah, 1422 H).

¹¹ M. N. Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2001), hlm. 42.

Distribusi Logistik	Manajemen Rute Geospasial Berbasis Sistem GPS	' <i>Adl</i> (Keadilan Afirmatif Wilayah)	Penerapan draf zonasi asimetris, afirmasi infrastruktur armada kurir taktis pedesaan/3T, dan penghapusan diskriminasi sekolah negeri-swasta.
Sistem Pengawasan	Instrumen Kamera Pengawas CCTV & Aplikasi Terpusat	<i>Amanah & Tabligh</i> (Transparansi Pelayanan)	Eksekusi audit mutu berkala oleh Korwil BGN serta penyediaan ruang fleksibilitas fiskal darurat yang akuntabel guna mencegah patologi kepatuhan semu.
Fase Evaluasi	Penilaian <i>Food Waste Index</i> & Kepuasan Rasa Konsumen	<i>Maslahah 'Ammah</i> (Dampak Sirkular)	Penguatan kemitraan ekonomi pendek bersama koperasi petani lokal desa serta perluasan indikator menuju <i>long-term outcome monitoring</i> status gizi.

Sumber Hasil Rekonstruksi Ilmiah Integrasi Kebijakan Publik, Tesis Ilham Budiman Panggabean (2026).

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, Model Integrasi Kebijakan Publik Berbasis Masalahah 'Ammah membuktikan secara teoretis bahwa sains administrasi modern yang mengutamakan rasionalitas, efisiensi logistik digital, dan standarisasi teknokratis CPPOB tidak harus dipisahkan secara sekuler-reduksionis dari prinsip moralitas keagamaan. Penanaman nilai tauhid dan etika *siyasaḥ syar'īyyah* bertindak sebagai energi spiritual internal penggerak (*moral driving force*) yang memproduksi kepatuhan hukum secara jauh lebih efektif dibandingkan instrumen pengawasan eksternal yang koersif. Perpaduan antara kecakapan teknokratis Badan Gizi Nasional dengan keluhuran etika Islam menjadi draf jaminan mutlak bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*), berwibawa, dan penuh berkah, sekaligus menjadi basis ketahanan nasional jangka panjang dalam mengantarkan generasi muda Sumatera Utara menuju kejayaan visi Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan berkelanjutan.¹²

PEMBAHASAN

A. Dinamika Eksekusi *Street-Level Bureaucracy* Polarisasi Kluster Pro dan Kontra

Implementasi kebijakan publik di tingkat akar rumput ditentukan oleh performa birokrasi barisan depan (*street-level bureaucracy*) yang berhadapan langsung dengan realitas sosiogeografis wilayah. Hasil riset lapangan di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan adanya Polarisasi Tata Kelola yang tajam antara wilayah yang mapan secara suprastruktur dengan wilayah marjinal.

Kluster Pro terbukti mampu mengaktualisasikan konsep *New Public Management* melalui efisiensi rantai pasok urban dan pelibatan ekonomi lokal. Keberhasilan SPPG Menarhanud 2 Kota Medan dalam mengelola *central kitchen* berkapasitas 3.000 porsi/hari menunjukkan pentingnya digitalisasi *feedback loop* harian antara pihak sekolah dan penyedia logistik guna mengunci ketepatan waktu distribusi. Kemampuan mitigasi operasional ini diperkuat oleh SPPG BPMP Sumut 1 yang berhasil menggerakkan roda ekonomi sirkular pedesaan melalui penyerapan komoditas pertanian lokal secara langsung dari petani. Pola penyerapan jangka pendek ini memotong dominasi makelar pangan, menjaga stabilitas harga, serta memastikan realisasi anggaran *at cost*

¹² A. A. Basyir, *Garis Besar Pemikiran Hukum dan Politik Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), hlm. 119.

melalui akun kliring Virtual Account Bank Himbara berjalan tanpa hambatan administrasi finansial. Karakter inklusif program ini juga terlihat pada SPPG Sibuhuan 1 di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Dahlan, yang secara adaptif menyesuaikan distribusi makanan dengan kalender kegiatan ibadah santri, membuktikan bahwa jaminan pemenuhan pangan negara dapat meruntuhkan sekat diskriminasi antara lembaga pendidikan negeri dan swasta tradisional.

Sebaliknya, kluster Kontra merekam rentetan kegagalan implementasi (*implementation failure*) yang dipicu oleh kekakuan sistem digital pusat dan "kebutaan spasial" perancang kebijakan. Kasus kelumpuhan likuiditas operasional di SPPG Sei Rampah 1 Kabupaten Serdang Bedagai menjadi bukti nyata bagaimana integrasi aplikasi teknologi terpusat seperti Dialur justru memicu patologi birokrasi baru. Penerapan sanksi pembekuan dana otomatis (*automatic penalty*) oleh sistem pusat akibat keterlambatan input nota belanja digital—yang sebenarnya dipicu oleh kendala *blank spot* internet pedesaan dan lambatnya administrasi pedagang tradisional—telah memutus modal kerja harian dapur umum. Akibatnya, pemenuhan zat gizi anak sekolah dikorbankan demi kepatuhan formalistik dokumen digital.

Hambatan struktural ini berlipat ganda di wilayah 3T seperti lokus SPPG Teluk Dalam 1 Kabupaten Nias Selatan. Ketiadaan infrastruktur penunjang seperti akses air bersih yang higienis serta pasokan listrik yang tidak stabil menghambat pengoperasian ruang pendingin (*cold storage*), memicu risiko tinggi pembusukan bahan makanan. Batas radius pengantaran maksimal yang diamanatkan petunjuk teknis menjadi tidak realistis akibat topografi perbukitan dan kondisi jalan yang rusak parah. Kondisi ini diperparah oleh penetapan indeks anggaran per porsi yang disamaratakan secara flat nasional, tanpa memperhitungkan koefisien kesulitan geografis (*geographical difficulty coefficient*) yang mendongkrak harga komoditas pangan akibat ongkos angkut laut, sehingga memaksa pengelola lokal memotong margin nutrisi bersih untuk menutupi biaya transportasi¹³.

Di sisi lain, karut-marut sinkronisasi data kuota antara Dapodik/EMIS dengan data riil di lapangan pada SPPG Pantai Labu 2 Deli Serdang memicu deviasi penargetan berupa bias *inclusion error* (anak golongan mampu menerima manfaat) dan *exclusion error* (anak nelayan miskin tercoret dari daftar). Ketidakpastian manifes harian ini memicu fenomena pemindahan beban kerja (*workload shifting*) administratif kepada dewan guru, yang pada akhirnya mendegradasi waktu dan konsentrasi mengajar di ruang kelas. Pada tingkat komando makro regional, efisiensi penyerapan Banper diawasi melalui portal SIPGN. Di tengah keterbatasan teknis tersebut, penggunaan diskresi taktis oleh Kepala Regional BGN Sumatera Utara untuk mengalihkan logistik makanan menjadi bantuan darurat pangan bagi warga saat banjir besar melanda, menunjukkan satu bentuk fleksibilitas birokrasi yang berorientasi pada penyelamatan jiwa manusia.

B. Tinjauan Aspek Etika Politik Islam Komitmen Amanah dan Distorsi Keadilan Distributif

Dalam kacamata Politik Islam (*Siyasah Syar'iyah*), Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki derajat legitimasi moral keagamaan yang sangat tinggi karena menyangkut kewajiban kolektif penguasa (*fardhu kifayah*) dalam menjamin hak pangan masyarakat. Secara teologis, orientasi kebijakan ketahanan pangan ini berakar pada nilai-nilai profetik universal yang memosisikan kekuasaan politik dan anggaran negara sebagai amanah transendental untuk mewujudkan kemaslahatan publik (*ri'ayah al-syu'un*).

Penerapan prinsip amanah birokrasi di lapangan mengacu secara ketat pada perintah operasional tata pemerintahan Islam yang termaktub dalam QS. An-Nisa (4) ayat 58, yang

¹³ A. Wibowo & Y. Yuliani, "Three Decades of School Meal Program Research: Bibliometric Insights for Governance and Sustainability of Indonesia's Free Nutritional Meal Initiative (MBG)," *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, Vol. 10, No. 1 (2026), hlm. 745, <https://doi.org/10.36574/jpp.v10i1.745>.

mewajibkan penyerahan hak dasar pelayanan langsung kepada pemilik sahnya secara jujur (*shiddiq*). Dalam analisis *Tafsir Al-Mishbah*, penggunaan kata *al-amanat* dalam bentuk jamak mengindikasikan bahwa tanggung jawab penguasa bersifat multidimensi, mencakup akuntabilitas administratif formal hingga tanggung jawab substantif terhadap pemenuhan gizi masyarakat miskin dan penanganan stunting. *Tafsir Ibnu Katsir* menegaskan bahwa para pemegang otoritas bertindak sebagai pengurus rakyat (*ra'in*) yang memikul konsekuensi hukum ketuhanan jika membiarkan terjadinya kebocoran anggaran publik akibat tindakan koruptif (*moral hazard*).

Potret keberhasilan kluster Pro (seperti di SPPG Menarhanud 2 dan Sibuhuan 1) mencerminkan kepatuhan terhadap nilai amanah melalui penegakan standar mutu higiene pangan CPPOB dan ketepatan waktu pelayanan sebagai bentuk perlindungan hak hidup generasi penerus. Namun sebaliknya, realitas pada kluster Kontra menyajikan bukti terjadinya distorsi nilai amanah birokrasi akibat kekakuan sistem kontrol pusat. Tindakan aplikasi Dialur yang membekukan dana operasional secara sepihak di SPPG Sei Rampah 1 dinilai mencederai esensi amanah pelayanan publik, karena birokrasi pusat lebih mengutamakan formalitas laporan digital ketimbang hak makan riil anak-anak. Dampak turunannya memicu patologi *compliance manipulation*, di mana para pelaksana di lapangan terpaksa memanipulasi unggahan data nota demi menghindari pemotongan otomatis oleh algoritma sistem, sebuah praktik administrasi yang bertentangan dengan nilai kejujuran (*shiddiq*) dalam Islam.

Lebih jauh lagi, penyeragaman indeks biaya anggaran per porsi secara flat nasional mencerminkan pelanggaran nyata terhadap nilai keadilan distributif (*al-'adalah al-tawzi'iyah*). Allah SWT memerintahkan penegakan keadilan yang proporsional dalam QS. An-Nahl (16) ayat 90. Berdasarkan uraian *Tafsir Al-Mishbah*, keadilan (*al-'adh*) menuntut perlakuan yang menempatkan sesuatu sesuai porsi, kondisi, dan kebutuhan spesifiknya. Menyamaratakan alokasi anggaran belanja makanan anak di wilayah terpencil 3T Nias Selatan dengan anak di wilayah urban Kota Medan merupakan bentuk ketidakadilan spasial yang nyata. Kebijakan pusat yang "buta wilayah" ini mengabaikan tingginya koefisien kesulitan geografis, sehingga secara tidak langsung memaksa pengelola lokal di wilayah marjinal mengorbankan kualitas zat gizi makanan demi menutup pembengkakan biaya angkut transportasi laut. Tindakan ini menzalimi hak-hak kaum lemah (*mustadh'afin*) dan memperlebar kesenjangan pembangunan antardaerah. Keadilan distributif ini juga tercoreng di SPPG Pantai Labu 2 melalui terjadinya bias data *inclusion and exclusion error* yang salah sasaran, serta pembebanan tugas logistik kepada guru tanpa adanya kompensasi yang makruf.

C. Maqashid Syariah dan Formulasi Model Integrasi Kebijakan Berbasis Masalah 'Ammah

Tujuan hakiki dari setiap perumusan kebijakan publik dalam Islam adalah menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan menolak segala bentuk kemudaratatan struktural secara kolektif. Tujuan utama syariat (*maqashid asy-syari'ah*) dalam pengelolaan negara wajib bersandar pada kaidah fikih politik Islam yang bersumber dari sabda Rasulullah SAW "*Tidak boleh ada bahaya (menimbulkan perkara yang memudaratkan tanpa sengaja) dan tidak boleh membalas bahaya*". Imam al-Nawawi dalam syarahnya menegaskan bahwa kaidah hukum ini mengikat penguasa secara mutlak untuk menghapus segala bentuk kelalaian tata kelola yang dapat membahayakan keselamatan publik. Krisis stunting laten dan kerawanan gizi akut pada anak-anak dinilai sebagai *darar* (bahaya biologis makro) yang merusak keberlangsungan hidup (*hifzhun nafs*) serta menurunkan kapasitas kognitif otak generasi masa depan (*hifzhul 'aql*).

Riset empiris di Provinsi Sumatera Utara membuktikan bahwa program MBG mampu melahirkan kemaslahatan multifaset (*al-maslahah al-multifaceted*) apabila dikelola secara tepat, seperti yang ditunjukkan oleh SPPG BPMP Sumut 1 dan Deli Serdang melalui integrasi model

ekonomi sirkular pedesaan. Penyerapan komoditas lokal secara konsisten melahirkan dampak pengganda ekonomi (*economic multiplier effect*) yang membebaskan petani dan peternak kecil dari cengkeraman tengkulak yang eksploitatif. Hal ini membuktikan bahwa *good governance* teknokratis modern tidak harus dipisahkan dari moralitas Islam. Nilai-nilai Islam justru bertindak sebagai energi moral penggerak internal (*moral driving force*) yang melahirkan kepatuhan sukarela birokrat secara jauh lebih efektif dibandingkan instrumen pengawasan eksternal yang kaku dan koersif.

Untuk menjembatani jarak implementasi (*implementation gap*) dan menghapus patologi birokrasi pada objek pengamatan, dirumuskan **Model Integrasi Kebijakan Publik Berbasis Masalah 'Ammah**. Model ini menyatukan keandalan teknokratis dengan parameter etika Islam ke dalam enam pilar operasional

1. **Perencanaan Data** Sinkronisasi data kuota manifes secara *real-time* lintas kementerian (Dapodik, EMIS, P3KE) berlandaskan nilai *amanah* dan *shiddiq* untuk mengeliminasi kesalahan penargetan (*inclusion and exclusion error*).
2. **Tata Keuangan** Mekanisme penganggaran digital *auto top-up* pada Virtual Account Bank Himbara yang diverifikasi secara *at cost* berbasis nilai *amanah* untuk menutup celah *moral hazard* makelar pangan dan pengendapan dana (*idle cash*).
3. **Operasional Dapur** Kepatuhan mutlak terhadap standardisasi higiene sanitasi CPPOB industri, penimbangan gramasi AKG, penguncian suhu termal makanan, serta penyimpanan *retained samples* sebagai wujud nyata prinsip kemaslahatan *hifzhun nafs* dan *hifzhul 'aql*.
4. **Distribusi Logistik** Pengoptimalan rute geospasial berbasis sistem GPS dengan menegakkan prinsip *'adl*, melalui pemberian formula indeks bantuan fiskal asimetris-afirmatif yang menghitung koefisien kesulitan geografis wilayah 3T serta menghapus sekat diskriminasi antara lembaga pendidikan negeri dan swasta.
5. **Sistem Pengawasan** Pemanfaatan kamera pengawas CCTV dapur yang terhubung langsung pada aplikasi dasbor SIPGN pusat, namun diimbangi dengan pemberian ruang diskresi fiskal darurat yang akuntabel bagi kepala regional guna mengantisipasi disrupsi sinyal lokal dan mencegah munculnya kepatuhan semu birokrasi lapangan.
6. **Fase Evaluasi** Perluasan indikator keberhasilan dari yang semula sekadar menghitung *food waste index* jangka pendek (*short-term output*) bergeser menuju sistem *long-term outcome monitoring* yang memantau perbaikan klinis status kesehatan dan perkembangan antropometri anak, didukung perluasan jaringan kemitraan ekonomi pendek bersama koperasi petani lokal desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Efektivitas tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan menunjukkan disparitas performa yang tajam di mana kluster Pro (SPPG Menarhanud 2, SPPG BPMP Sumut 1, dan SPPG Sibuhuan 1) sukses menerapkan model dapur pusat (central kitchen) 3.000 porsi/hari, digitalisasi feedback loop, ekonomi sirkular desa, serta inklusivitas pelayanan keagamaan tradisional swasta, sedangkan kluster Kontra merekam kegagalan implementasi (*implementation failure*) berupa hambatan finansial akibat pembekuan saldo Virtual Account otomatis oleh aplikasi Dialur di area perdesaan minim internet Sei Rampah, hambatan infrastruktur spasial di wilayah 3T Nias Selatan, serta bias penargetan kuota

- (inclusion and exclusion error) di wilayah pesisir Pantai Labu yang memicu beban kerja tambahan (workload shifting) ke pundak dewan guru.
2. Implikasi penerapan Program MBG terhadap nilai Etika Politik Islam membuktikan bahwa potret keberhasilan kluster Pro berhasil menegakkan nilai amanah jabatan, shiddiq, dan khidmah publik yang berorientasi masalah, namun realitas pada kluster Kontra memperlihatkan terjadinya distorsi nilai amanah dan pelanggaran keadilan distributif (al-'adalah al-ijtima'iyah) akibat kebutaan spasial birokrasi pusat yang mengorbankan perlindungan hak hidup (hifzhun nafs) dan kapasitas kognitif (hifzhul 'aql) anak sekolah dasar sebagai kaum mustadh'afin di tingkat akar rumput.
 3. Model Integrasi Kebijakan Publik Berbasis Masalah 'Ammah yang dirumuskan melalui penelitian tesis multisitus ini berhasil menyintesis secara ideal bahwa keandalan regulatif good governance aspek teknokratis modern (perencanaan digital tunggal, penganggaran digital at cost, standar mutu CPPOB) wajib diintegrasikan dengan roh penggerak moral etika pemerintahan Islam (nilai amanah, keadilan hukum, dan kemaslahatan publik) guna meminimalisir moral hazard birokrasi serta menciptakan tata kelola jaminan pangan nasional yang jujur, transparan, akuntabel, inklusif, dan berdaya laku berkelanjutan.

Saran

1. Kepada Badan Gizi Nasional pusat disarankan untuk segera melakukan reformasi perangkat teknologi informasi Dialur dengan menghapus instrumen sanksi pembekuan otomatis (automatic penalty) Virtual Account pada daerah rural minim sinyal guna menghindari patologi manipulasi kepatuhan, serta menggantinya dengan verifikasi manual periodik terintegrasi.
2. Kepada perencana kebijakan fiskal nasional disarankan untuk merombak indeks anggaran flat per porsi yang disamaratakan secara nasional dan segera menerbitkan formula indeks Banper asimetris-afirmatif yang menghitung koefisien kesulitan geografis (geographical difficulty coefficient) khusus bagi wilayah terpencil pulau 3T seperti Nias Selatan demi menegakkan keadilan spasial.
3. Kepada Kantor Regional BGN Provinsi Sumatera Utara disarankan untuk memperkuat intergovernmental relations bersama Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama daerah guna mempercepat validasi data sirkular kuota siswa real-time, menambah alokasi personel kurir logistik mandiri agar terhindar dari bias workload shifting guru, menyediakan rapid test kit kandungan zat kimia berbahaya pada Korwil, serta memperluas indikator evaluasi dari yang semula berorientasi makro output jangka pendek (short-term output) bergeser secara komprehensif menuju sistem pemantauan kesehatan klinis dan kenaikan indeks antropometri anak jangka panjang (long-term outcome monitoring).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ungkapan rasa hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya penulis haturkan secara mendalam kepada Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, Dr. Maraimbang Daulay, M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, serta Dr. Zulkarnaen, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Program Studi Magister Pemikiran Politik Islam UINSU atas segala fasilitas akademik,

bimbingan teknokratis yang visioner, serta ketajaman arahan metodologi ilmiah yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan naskah tesis ini. Apresiasi akademis yang luar biasa juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Hasyimsyah Nasution, M.A. dan Dr. Elly Warnisyah Harahap, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, pikiran, serta mentransfer pisau analisis konseptual integrasi politik Islam yang tajam untuk mengawal penyempurnaan karya ilmiah ini.

Secara materil dan operasional lapangan, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada segenap jajaran birokrasi Kantor Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Sumatera Utara, para Kepala dan Pengawas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokus perkotaan, pedesaan, hingga kepulauan terpencil 3T yang telah menyambut terbuka serta bersedia menjadi informan kunci penelitian ini. Secara personal, untaian doa spiritual tak terhingga penulis persembahkan kepada Ibunda Rasmi Situmorang tercinta atas lentera keikhlasan doa yang tiada pernah putus di setiap sujudnya, serta rasa terima kasih yang mendalam kepada rekan diskusi ideologis sekaligus mitra dialektika kritis penyusunan karya ilmiah ini, Defar Badruzaman, S.Sos., S.Bns., yang senantiasa menemani penulis dalam merumuskan draf pemikiran tata kelola ketahanan pangan nasional yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti. (2026). *Implementasi program makan bergizi gratis Dinamika ekonomi politik dan partisipasi aktor lokal di Banyumas* (Tesis Magister, Universitas Jenderal Soedirman). Repository Universitas Jenderal Soedirman.
- Al-Bukhari, A. A. M. B. I. (1422 H). *Shahih al-Bukhari*. Kitab al-Ahkam, No. Hadis 7138. Dar Thauk al-Najah.
- Aulia, D. D., Astri, A., Afriani, T. L., & Kurniati. (2025). The existence of universal values of Islamic political ethics in the formation of public policy. *Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies*, 2(2), 145–168.
- Badan Gizi Nasional. (2025). *Pedoman umum penyelenggaraan program makan bergizi gratis*. Badan Gizi Nasional.
- Basyir, A. A. (2024). *Garis besar pemikiran hukum dan politik Islam kontemporer*. Pustaka Pelajar.
- Hadinata, M. (2026). Free nutritious meal policy in Indonesia under President Prabowo A policy, fiscal, and political analysis grounded in international evidence. *Jurnal Bina Praja*, 18(1), 2896. <https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.2896>.
- Harahap, E. W., & Zulkarnain. (2024). Government policy in the national strategy for prevent and eradicate corruption in state Islamic religious universities. *Al-Hayat Journal of Islamic Education*, 8(1), 517. <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i1.517>.
- Ibnu Katsir. (2022). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Vol. 2). Dar Thayyibah.
- Kameubun. (2025). *Analisis implementasi kebijakan program makan bergizi gratis (MBG) berdasarkan sentimen pengguna media sosial* (Tesis Magister, Politeknik STIA LAN Jakarta). Repository Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2024). *Kebijakan pembangunan gizi dan pangan nasional*. Bappenas.
- Makambombu, I. S. (2026). Local food, centralized governance, and the limits of policy localization in Indonesia's free nutritious school meal program Evidence from Sumba. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 7(1), 946. <https://doi.org/10.46456/jiSMAep.v7i1.946>.
- Munawarah, & Dakhoir. (2026). Kebijakan makan bergizi gratis di provinsi Kalimantan Tengah Kajian filosofis ekonomi islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 12(1), 89–104.

- Nasution, H., & Azhar, A. A. (2025). Etika muajadalah dalam al-Qur'an dan implementasinya pada debat politik Studi kasus pilgub Sumatera Utara 2024. *Islam & Contemporary Issues*, 5(1), 1679. <https://doi.org/10.57251/ici.v5i1.1679>.
- Nugroho, R. (2024). *Kebijakan publik Formulasi, implementasi, dan evidence-based policy*. Elex Media Komputindo.
- Pratama, N., Harianto, Wiyaka, A., & Ridwan, A. (2026). Implementation of the free nutritional meal program policy from a good governance perspective in Madiun City in 2025. *International Journal Administration, Business & Organization*, 7(2), 731. <https://doi.org/10.61242/ijabo.26.731>.
- Pulungan, J. S. (2024). *Prinsip-prinsip siyasah syar'iyah mencegah lapar dan takut*. Amzah.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 14 & 15). Lentera Hati.
- Silaban. (2026). *Analisis implementasi kebijakan program makan bergizi gratis di kota Jambi* (Tesis Magister, Universitas Jambi). Repository Universitas Jambi.
- Siddiqi, M. N. (2001). *Role of the state in the economy An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Susanti. (2026). *Persepsi masyarakat terhadap kelangsungan program makan bergizi gratis (MBG) melalui analisis konten di media sosial Instagram* (Tesis Magister, Universitas Jenderal Soedirman). Repository Universitas Jenderal Soedirman.
- Wibowo, A., & Yuliani. (2026). Three decades of school meal program research Bibliometric insights for governance and sustainability of Indonesia's free nutritional meal initiative (MBG). *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 10(1), 745. <https://doi.org/10.36574/jpp.v10i1.745>.
- Wirmanshanda, & Helmi. (2026). Pelaksanaan program makanan bergizi gratis (MBG) berdasarkan peraturan presiden nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(1), 55–72.